

## ABSTRAK

- A. Nama : Ferdinand De Lapasha  
B. NIM : 205180003  
C. Halaman :  
D. Kata Kunci : Disparitas, Pedoman Pidana, UU ITE, Prostitusi secara online.  
E. Isi :

Disparitas pidana merupakan sesuatu yang wajar terjadi dalam suatu putusan. Pengertian secara umum tentang disparitas adalah adanya rentang perbedaan yang besar dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana dalam kasus yang sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang sama. Disparitas dibagi menjadi dua yaitu disparitas yang dapat dipertanggungjawabkan (*Warrented disparity*) dan juga disparitas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan (*Unwarrented disparity*). Tidak ada pendefinisian secara konkrit terkait pengertian disparitas tersebut. Peneliti menggunakan putusan No.Pid.Sus/2019/PN.Smn dan putusan No.445/Pid.Sus/2020/PN.Pal. Di Negara Indonesia memang belum ada pedoman pidana yang bisa dipakai yang mana dalam pedoman tersebut terdapat variabel-variabel yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim, namun peneliti telah mendapatkan kriteria dari disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Unwarrented disparity*). Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, putusan-putusan yang digunakan bisa dikatakan memenuhi kriteria disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*Unwarrented disparity*) karena hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana telah memenuhi salah satu kriteria disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu kekeliruan dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

- F. Acuan : 16 (1992-2020)  
G. Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H  
H. Penulis : Ferdinand De Lapasha